



Kementerian PPN/
Bappenas



SATU DATA
INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan

Agung Indrajit

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian
PPN/Bappenas selaku Sekretaris Sekretariat
Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

06 April 2024



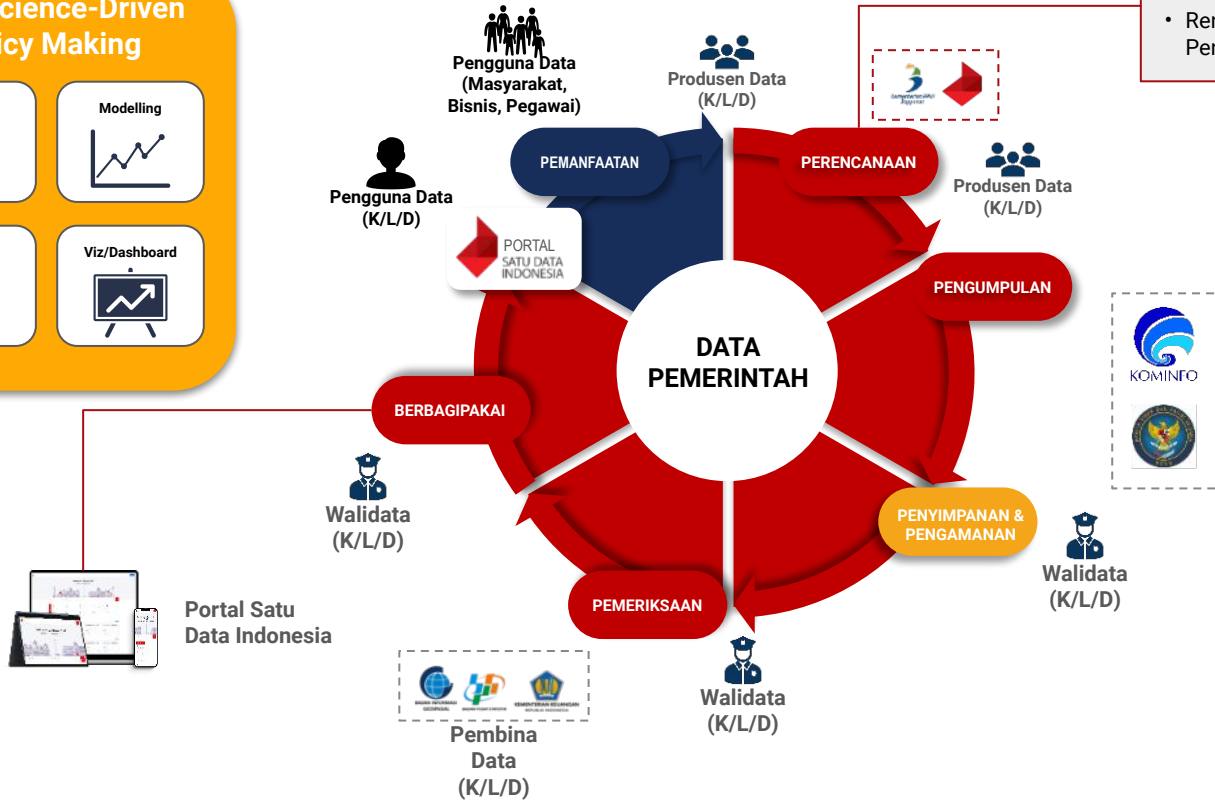
Tata Kelola Satu Data Indonesia

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah

Data-Science-Driven Policy Making

- Big Data Analysis
- Modelling
- Artificial Intelligent
- Viz/Dashboard

- Daftar Data Prioritas
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku



Prinsip Satu Data

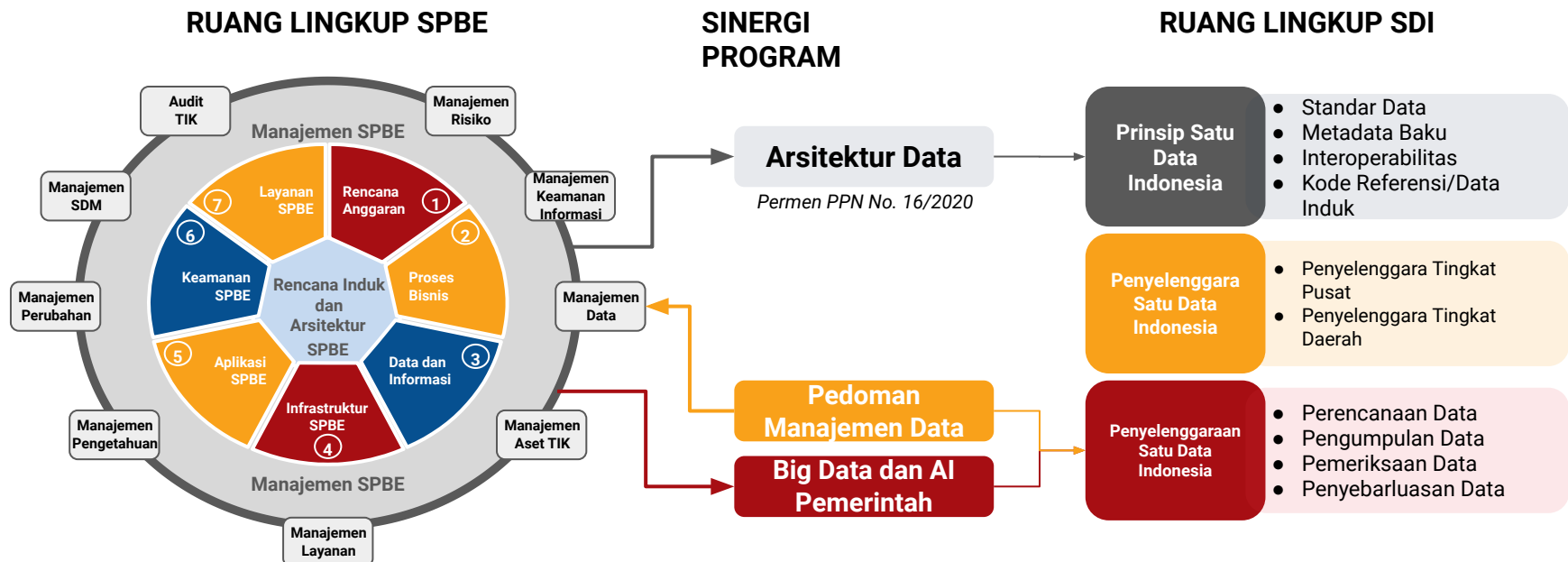
- Standar Data
- Kode Referensi
- Metadata
- Interop

Sinergi SDI dan SPBE

Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE pasal 49 Pedoman Manajemen Data SPBE diatur dengan **Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional**
Peraturan Presiden No.132 tentang Arsitektur SPBE (Lampiran Bab IV, Sub Bab B Referensi Arsitektur Data dan Informasi)



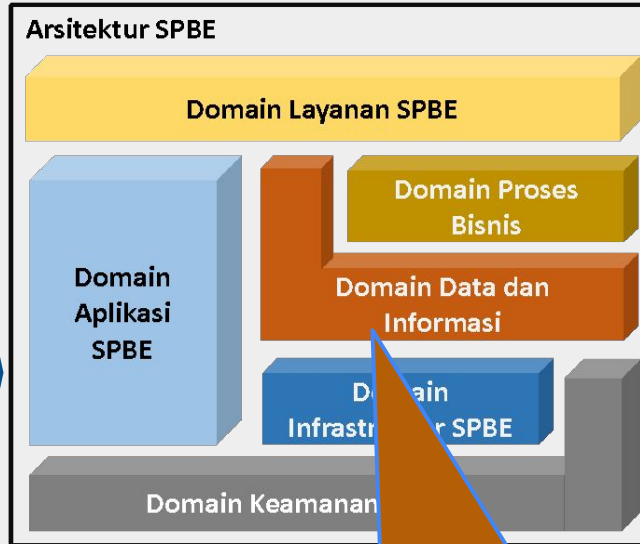
Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana menjamin terwujudnya Data sesuai dengan Prinsip SDI sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.



Urgensi SDI untuk Clearance Belanja TIK

TANTANGAN PERTUKARAN DATA:

1. Kurang **integrasi data** dengan aplikasi lainnya yang tidak berhubungan dengan proses bisnisnya (**mempertahankan silo**);
2. Belum memiliki **standar data, metadata, dan kode referensi**;
3. Kurang **dokumentasi data**
4. Kurang **manajemen data**, termasuk menghasilkan/menggunakan data yang tidak sesuai dengan kaidah data management
5. Anggapan bahwa tata kelola data **SDI mempersulit** pekerjaan pengembangan aplikasi



Peran Penting Audit Aplikasi SPBE

Audit Aplikasi SPBE untuk mendukung SDI dibutuhkan untuk memastikan hal berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan memiliki rancangan dan dokumentasi domain data & informasi dalam arsitektur SPBE yang sesuai dengan SDI.
2. Sumber data untuk aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan SDI.
3. Data yang dihasilkan/diolah sesuai dengan Prinsip SDI.

Clearance Kegiatan Pendataan

merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola data termasuk data yang dihasilkan melalui pengembangan aplikasi

Data Clearance

Clearance Belanja TIK / Evaluasi Anggaran SPBE pada domain Data dan Informasi, dimana penyelenggaraan Data SPBE harus berdasarkan Kebijakan SDI

Ruang Lingkup Belanja TIK

1. Pembangunan/pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
2. Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE;
3. Pengadaan lainnya yang bersifat nonteknis dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan/atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintah;
4. Pendataan (sensus, survei, registrasi, kompilasi produk administrasi), pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya.

Tujuan Clearance Belanja Data

1. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Keterpaduan Belanja Data
2. Pemetaan dan Inventarisasi aset Data beserta Aplikasi Terkait
3. Dukungan Percepatan Penerapan Arsitektur Data
4. Dukungan Perluasan Penerapan Standar Data

Kriteria Belanja Data

1. Data Statistik, dengan rincian:
 - a. Survei atau Kompilasi Produk Administrasi;
 - b. Pendataan atau Registrasi;
 - c. Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Statistik;
 - d. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan Data Statistik kepada pihak lain.
2. Data Geospasial, dengan rincian:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial;
 - b. Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Geospasial;
 - c. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka pengumpulan data atau permintaan Data Geospasial kepada pihak lain.
3. Data Lainnya, dengan rincian:
 - a. Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data Lainnya;
 - b. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain.

Evaluasi Belanja TIK (clearance) direncanakan akan diimplementasikan juga di tingkat Daerah



Sinergi Clearance Belanja Data tingkat Daerah dengan Penyelenggara SDI Daerah



Terima Kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id



+62 822-6000-7040